



---

## Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(Studi Kasus pada BPKAD Kabupaten Gianyar)

Pande Komang Ayu Sinta Lestari<sup>1</sup>, Anantawikrama Tungga Atmadja<sup>2</sup>, Putu Yunartha Pradnyana Putra<sup>3</sup>

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi : [pande.ayu.sinta@student.undiksha.ac.id](mailto:pande.ayu.sinta@student.undiksha.ac.id)<sup>1</sup>,

[anantawikrama\\_t\\_atmadja@undiksha.ac.id](mailto:anantawikrama_t_atmadja@undiksha.ac.id)<sup>2</sup>, [putuyunartha.pradnyana.putra@undiksha.ac.id](mailto:putuyunartha.pradnyana.putra@undiksha.ac.id)<sup>3</sup>

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 18 Mei 2026

---

### ABSTRACT

*This study aims to understand the process of preparing Local Government Financial Reports (LKPD), identify substantive challenges encountered in the preparation process, and formulate recommendations for improvement for the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Gianyar Regency. The study employs a qualitative approach using the case study method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, and were then analyzed using the Miles and Huberman data analysis model. The research results indicate that the LKPD preparation process is part of an integrated local government financial management cycle, encompassing the planning and budgeting stage, budget execution, financial administration, through to financial reporting and consolidation by the BPKAD, followed by an internal review by the Inspectorate and an audit by the State Audit Agency (BPK). Substantive constraints identified include: information system disruptions at the end of the fiscal year, limited understanding among officials regarding the accrual-based SAP system, insufficient human resources, delays in data submission from OPDs, and a predominance of corrective controls over preventive ones. These challenges were influenced by disparities in human resource capacity among OPDs, the complexity of the consolidation process, limited information system integration, and suboptimal coordination. The recommendations include strengthening information systems, enhancing human resource competencies through ongoing technical guidance, strengthening knowledge management, optimizing human resource allocation, strengthening preventive controls, and improving time management.*

**Keywords:** BPKAD, LKPD, preparation process, public sector accounting, substantive constraints.

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), mengidentifikasi kendala substantif yang terjadi dalam praktik penyusunan, serta merumuskan saran perbaikan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan LKPD merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, meliputi tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, hingga pelaporan dan konsolidasi laporan keuangan oleh BPKAD, dilanjutkan dengan review internal oleh*

---

*Inspektorat dan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kendala substantif yang teridentifikasi meliputi: gangguan sistem informasi pada akhir tahun anggaran, keterbatasan pemahaman aparatur terhadap SAP berbasis akrual, keterbatasan kuantitas SDM, keterlambatan penyampaian data dari OPD, serta dominannya pengendalian yang bersifat korektif dibandingkan preventif. Kendala-kendala tersebut dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas sumber daya manusia antar OPD, kompleksitas proses konsolidasi, keterbatasan integrasi sistem informasi, serta belum optimalnya koordinasi. Saran tindak mencakup penguatan sistem informasi, peningkatan kompetensi SDM melalui bimbingan teknis berkelanjutan, penguatan knowledge management, penataan distribusi SDM, penguatan pengendalian preventif, serta perbaikan manajemen waktu.*

**Kata kunci:** *akuntansi sektor publik, BPKAD, kendala substantif, LKPD, proses penyusunan.*

## PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi dua prinsip penting yang selalu diupayakan. Keduanya merupakan bagian dari semangat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Penerapan prinsip tata kelola yang baik menjadi hal yang penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, terutama pada entitas yang memiliki tanggung jawab publik yang besar (Prayudi, 2024). Akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam pengelolaan keuangan publik yang menuntut adanya pertanggungjawaban atas setiap aktivitas pengelolaan keuangan (Atmadja dkk., 2021). Salah satu bentuk nyata dari tanggung jawab tersebut adalah tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang informatif, andal, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sejalan dengan pendapat Irwansyah dkk. (2022) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil, sehingga mampu menciptakan pengelolaan keuangan yang baik serta meningkatkan kepercayaan publik.

Standar Akuntansi Pemerintahan telah ditetapkan, praktik penyusunan dan penatausahaan laporan keuangan dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh bagaimana proses tersebut dijalankan oleh aparatur yang terlibat (Julianto & Sujana, 2023). Pemerintah menetapkan bahwa laporan keuangan daerah wajib disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Rahmayani, 2023). LKPD menjadi salah satu instrumen penting untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Dewi dkk. (2022) bahwa pelaksanaan otonomi daerah merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dengan mengutamakan akuntabilitas dan transparansi. Laporan keuangan pemerintah yang baik seharusnya memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 (Pratama dkk., 2024). pemilihan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam proses penyusunan Laporan Keuangan

---

Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi sangat penting karena berpengaruh terhadap kualitas akhir laporan keuangan yang dihasilkan (Rencana dkk., 2024). Sikap dan kemampuan kognitif aparatur berperan penting dalam proses pengambilan Keputusan (Sujana & Dharmawan, 2023). Namun, dalam praktiknya, proses penyusunan LKPD masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain berkaitan dengan perbedaan karakteristik dan kondisi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), keterbatasan pemahaman aparatur terhadap ketentuan teknis pelaporan keuangan, serta dinamika penerapan sistem pengendalian internal.

Kabupaten Gianyar secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD selama lebih dari satu dekade, termasuk pada Tahun Anggaran 2022, 2023, dan 2024. Namun demikian, berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Bali, BPK mencatat adanya berbagai temuan yang berulang, seperti kekurangan penerimaan pajak daerah, pengelolaan aset tetap yang belum memadai, dan perencanaan pendapatan yang belum berbasis data yang valid. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun laporan keuangan telah memenuhi standar administratif, masih terdapat ruang perbaikan dalam aspek substantif proses penyusunannya. Dalam konteks tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar memegang peran sentral sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyusunan LKPD secara terintegrasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) memahami dan mendeskripsikan proses penyusunan LKPD di BPKAD Kabupaten Gianyar; (2) mengidentifikasi dan menganalisis kendala substantif yang muncul dalam praktik penyusunan; serta (3) merumuskan saran tindak untuk mendukung perbaikan proses pelaporan keuangan daerah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang berkaitan dengan proses penyusunan LKPD serta berbagai kendala substantif yang muncul dalam praktik pelaporan keuangan daerah. Menurut Moelong (2019), penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati. Penelitian ini dilaksanakan di BPKAD Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Pemilihan lokasi didasarkan pada peran strategis BPKAD sebagai instansi teknis yang memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan dan penyusunan LKPD.

Jenis dan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan empat informan yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses penyusunan dan review LKPD, yaitu: (1) Kepala Sub Bidang Akuntansi BPKAD (I1); (2) Bendahara OPD dari Bappeda (I2); (3) Auditor Inspektorat (I3); dan (4) Kepala Auditor Inspektorat (I4). Data sekunder mencakup Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2022, 2023, dan 2024; SOP penyusunan laporan keuangan; LKPD Kabupaten Gianyar; serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Metode

pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi non-partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (2014) yang terdiri dari tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, serta perpanjangan pengamatan dan ketekunan pengamatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

Proses penyusunan LKPD di BPKAD Kabupaten Gianyar merupakan bagian integral dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Proses ini mencakup lima tahapan utama yang saling berkaitan.

#### **1. Tahap Perencanaan dan Penganggaran**

Tahap ini merupakan fondasi struktur laporan keuangan karena klasifikasi program, kegiatan, dan kode rekening ditetapkan sejak awal. Proses dimulai dari penyusunan RKPD, KUA, PPAS, hingga RKA dan penetapan APBD. BPKAD memverifikasi dokumen RKA dan memastikan kesesuaian klasifikasi akun dengan sistem akuntansi. Setelah APBD ditetapkan, seluruh struktur anggaran dikunci dalam sistem informasi keuangan, sehingga setiap transaksi harus mengikuti kode rekening yang telah ditentukan. Informan OPD menyatakan:

*"Apa yang kami laporkan di akhir tahun sebenarnya sudah dibentuk sejak tahap perencanaan. Kode rekening dan struktur kegiatan itu sudah ditentukan dari awal penyusunan anggaran." (I2)*

Kondisi ini mencerminkan akuntabilitas proses sebagaimana dikemukakan Prayogo dkk. (2023) bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh ketepatan proses perencanaan dan penganggaran.

#### **2. Tahap Pelaksanaan Anggaran**

Seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan direalisasikan oleh masing-masing OPD. Pencatatan transaksi pendapatan dan belanja dilakukan secara real-time dalam sistem informasi keuangan daerah berbasis akrual sesuai Peraturan Bupati Gianyar Nomor 40 Tahun 2025. BPKAD berperan mengelola kas daerah, memverifikasi transaksi, dan memastikan tidak ada pengeluaran yang melebihi pagu APBD. Proses ini mencerminkan akuntabilitas keuangan dan kinerja sebagaimana diungkapkan informan:

*"Belanja tidak bisa langsung dibayar begitu saja. Harus ada verifikasi dokumen, persetujuan pejabat, baru diproses di sistem. Semua sudah terstruktur." (I2)*

#### **3. Tahap Penatausahaan oleh OPD**

OPD sebagai entitas akuntansi bertanggung jawab menyusun laporan keuangan tingkat perangkat daerah, mencakup pengumpulan dan verifikasi dokumen sumber, pencatatan transaksi, rekonsiliasi internal berkala, serta penyusunan LRA, Neraca, LO, dan rincian aset. PPK-OPD melakukan verifikasi kesesuaian dengan DPA, ketepatan kode rekening, kelengkapan dokumen, dan konsistensi dengan pagu anggaran. Setelah laporan selesai

---

disusun dan diverifikasi, laporan disampaikan ke BPKAD melalui sistem informasi keuangan terintegrasi. Sebagaimana dinyatakan informan:

*"Di OPD kami tidak hanya melaksanakan anggaran, tetapi juga bertanggung jawab menyusun laporan keuangan perangkat daerah sebelum dikirim ke BPKAD."* (I2)

#### **4. Tahap Rekonsiliasi dan Penyusunan LKPD oleh BPKAD**

BPKAD sebagai entitas pelaporan menerima laporan dari seluruh OPD dan melakukan verifikasi awal, rekonsiliasi internal antar bidang (Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan, Aset), rekonsiliasi eksternal dengan OPD, penyesuaian jurnal akrual (penyusutan, beban yang masih harus dibayar), serta konsolidasi laporan seluruh OPD menjadi LKPD yang terdiri dari tujuh komponen utama berikut CaLK. Informan BPKAD menyatakan:

*"Semua laporan dari OPD akhirnya masuk ke kami. Kami yang bertanggung jawab menyajikan LKPD secara keseluruhan sebelum disampaikan ke tahap berikutnya."* (I1)

Proses ini sejalan dengan Halim (2014) dan Mahmudi (2016) yang menyatakan bahwa laporan keuangan daerah merupakan laporan konsolidasian yang menggabungkan laporan seluruh entitas akuntansi, dengan BPKAD berfungsi sebagai gatekeeper kualitas laporan.

#### **5. Tahap Review Inspektorat dan Pemeriksaan BPK**

Inspektorat Kabupaten Gianyar sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melaksanakan review LKPD sebagai bagian dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Review bertujuan memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa LKPD telah disusun sesuai SAP sebelum dilakukan audit oleh BPK. Proses review mencakup uji analitis (perbandingan antarperiode, uji artikulasi antar laporan, uji keseimbangan), pembekuan data pada tanggal tertentu, serta penerbitan surat usulan perbaikan kepada BPKAD apabila ditemukan ketidaksesuaian. Informan Inspektorat menyatakan:

*"Kalau ada lonjakan angka yang tidak wajar atau berbeda signifikan dari tahun sebelumnya, itu langsung kami jadikan red flag untuk ditelusuri lebih lanjut."* (I4)

Setelah perbaikan dilakukan, LKPD diserahkan kepada BPK RI untuk dilakukan pemeriksaan eksternal. BPKAD berperan sebagai representasi pemerintah daerah dalam menyediakan dokumen pendukung dan memberikan klarifikasi kepada tim pemeriksa. Keseluruhan proses ini mencerminkan mekanisme akuntabilitas berlapis sebagaimana dikemukakan Bovens (2007) dan Flint (1989) bahwa audit publik berfungsi memberikan jaminan keandalan laporan keuangan pemerintah.

#### **Kendala Substantif dalam Proses Penyusunan LKPD**

Meskipun secara normatif proses penyusunan LKPD telah berjalan sesuai ketentuan, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala substantif yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan. Sebagaimana dinyatakan informan

BPKAD: "Secara regulasi dan sistem sebenarnya sudah lengkap, tetapi dalam praktiknya tetap ada kendala, terutama menjelang tutup tahun anggaran." (I1)

**Tabel 1. Penyebab Kendala Substantif yang Teridentifikasi**

Jenis Kendala	Temuan di Lapangan (Akar Masalah)	Dampak terhadap LKPD
Sistem Informasi	Lonjakan akses bersamaan di akhir tahun & koneksi internet lambat.	Tertundanya rekonsiliasi & keterlambatan data ke Inspektorat.
Kompetensi SDM	Kurangnya dasar akuntansi & seringnya rotasi pegawai.	Kesalahan klasifikasi akun belanja & pencatatan pajak.
Kuantitas SDM	Beban kerja menumpuk di 1-2 orang; kekosongan jabatan di OPD.	Verifikasi internal tidak berlapis; risiko human error tinggi.
Manajemen Waktu	Rekonsiliasi internal OPD tidak rutin, menumpuk di akhir.	Waktu review Inspektorat menjadi sempit & tidak maksimal.

## 1. Gangguan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sistem informasi keuangan daerah mengalami gangguan pada akhir tahun anggaran akibat lonjakan akses simultan seluruh OPD. Kondisi ini menyebabkan proses rekonsiliasi tertunda, konsolidasi terhambat, dan keterlambatan penyampaian data ke Inspektorat. Inspektorat menyatakan: "Ketika sistem bermasalah, otomatis data yang kami butuhkan untuk review juga ikut tertunda, jadi data yang kami dapat itu tidak lengkap, yaaa jadinya lama." (I3; I4). Romney dan Steinbart (2018) menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi yang tidak stabil dapat meningkatkan risiko kesalahan dalam penyajian laporan keuangan.

## 2. Keterbatasan Pemahaman SDM terhadap Akuntansi Berbasis Akrua

Masih terdapat kesalahan teknis dalam pengakuan beban akrual, pencatatan kewajiban yang masih harus dibayar, klasifikasi akun belanja, serta pemotongan dan pencatatan pajak. Inspektorat menyatakan: "Kesalahan yang sering kami temukan biasanya terkait pengakuan beban akrual dan pencatatan kewajiban yang masih harus dibayar." (I4). Permasalahan ini diperparah oleh rotasi jabatan yang menyebabkan proses adaptasi aparatur baru terus berulang. Aparatur OPD mengakui: "Kadang baru saja paham, sudah mutasi. Jadi perlu adaptasi lagi." (I2). Kondisi ini sesuai dengan temuan Sinarwati dkk. (2025) bahwa keterbatasan pemahaman aparatur terhadap standar pelaporan dapat memengaruhi kesesuaian laporan keuangan.

### 3. Keterbatasan Kuantitas SDM dan Beban Kerja Tidak Seimbang

Jumlah personel pengelola keuangan pada beberapa OPD masih terbatas, menyebabkan beban kerja terkonsentrasi pada satu atau dua orang, terutama pada akhir tahun. Inspektorat menyatakan: "Di beberapa OPD, pengelolaan keuangan masih sangat bergantung pada satu atau dua orang." (I3). Kondisi ini melemahkan mekanisme cross-check internal dan meningkatkan risiko human error (Reason, 1993). COSO (2012) menjelaskan bahwa pemisahan tugas (segregation of duties) merupakan komponen penting dalam sistem pengendalian internal.

### 4. Keterlambatan Penyampaian Data dari OPD

Belum optimalnya rekonsiliasi internal OPD dan penumpukan pekerjaan menyebabkan keterlambatan penyampaian data ke BPKAD, sehingga waktu review Inspektorat menjadi sempit. Inspektorat menyatakan: "Kadang data dari OPD belum sepenuhnya final saat kami mulai review." (I3); dan "Kalau waktu review makin sempit, tentu analisis harus lebih intens." (I4). Mahmudi (2016) menegaskan bahwa koordinasi dan ketepatan waktu penyampaian data merupakan faktor kunci dalam kelancaran proses pelaporan keuangan daerah.

### 5. Dominannya Pengendalian Korektif (ex-post)

Mekanisme pengendalian yang berjalan masih didominasi tindakan korektif setelah kesalahan terjadi. Inspektorat mengungkapkan: "Temuan yang serupa kadang masih muncul setiap tahun." (I4). Kondisi ini mengindikasikan bahwa perbaikan yang dilakukan belum menyentuh akar permasalahan. COSO (2012) dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP menegaskan bahwa pengendalian internal yang efektif harus mencakup kegiatan preventif untuk mencegah kesalahan sejak tahap awal pencatatan.

### *Saran Tindak untuk Perbaikan Proses Penyusunan LKPD*

Berdasarkan akar masalah yang teridentifikasi, diperlukan pendekatan perbaikan yang komprehensif, tidak hanya bersifat teknis tetapi juga menyentuh aspek struktural dan berkelanjutan. Sebagaimana diungkapkan informan BPKAD:

"Perbaikan harus menyeluruh, tidak bisa hanya di satu sisi saja." (I1).

#### 1. Penguatan dan Modernisasi Sistem Informasi Keuangan Daerah

Diperlukan peningkatan kapasitas infrastruktur server, pengembangan sistem *backup* dan *disaster recovery plan*, penerapan penjadwalan input data secara bertahap untuk mengurangi beban simultan, serta evaluasi teknis berkala melalui audit teknologi informasi. Adiputra dkk. (2021) menegaskan bahwa sistem akuntansi berperan dalam menyediakan informasi berkualitas untuk mendukung pengendalian organisasi.

#### 2. Peningkatan Kompetensi SDM melalui Bimbingan Teknis Berkelanjutan

Kompetensi aparatur mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan yang tepat sasaran (Diatmika & Rahayu, 2020). Bimtek rutin terkait SAP berbasis akrual, *workshop* perpajakan, simulasi penyusunan jurnal penyesuaian akhir tahun, program mentoring BPKAD-OPD, dan penyusunan modul teknis internal yang terdokumentasi. Safrizal (2023) menegaskan bahwa bimbingan teknis secara signifikan meningkatkan pemahaman pegawai mengenai akuntansi konsolidasi.

### 3. Penguatan *Knowledge Management* dan Transfer Pengetahuan

Dokumentasi prosedur kerja secara sistematis, penyusunan panduan teknis per jenis transaksi, program pendampingan terstruktur bagi pegawai baru/hasil rotasi, dan pembentukan forum koordinasi rutin antar bendahara OPD. Nonaka (2024) menjelaskan bahwa *knowledge management* berperan mengubah pengetahuan individu menjadi aset organisasi melalui proses dokumentasi dan berbagi pengetahuan.

### 4. Penataan Kuantitas dan Distribusi SDM Pengelola Keuangan

Analisis beban kerja secara sistematis, penambahan atau redistribusi personel pada OPD dengan volume transaksi tinggi, serta penerapan sistem kerja berbasis tim untuk memperkuat mekanisme *cross-check internal*. Arens dkk. (2017) menjelaskan bahwa keterbatasan SDM dapat mengurangi efektivitas sistem pengendalian internal karena tidak semua fungsi pengawasan dapat dijalankan secara terpisah.

### 5. Penguatan Pengendalian Preventif dan Rekonsiliasi Berkala

Pelaksanaan rekonsiliasi internal bulanan/triwulanan, penerapan checklist verifikasi wajib sebelum laporan disampaikan ke BPKAD, monitoring progres penyusunan secara periodik oleh BPKAD, serta *early review* oleh Inspektorat sebelum finalisasi. Informan menyatakan:

"Kalau rekonsiliasi dilakukan lebih rutin, koreksi di akhir bisa lebih sedikit."  
(I3; I4).

### 6. Perbaikan Manajemen Waktu dan Timeline Penyusunan

Penyusunan timeline internal yang lebih ketat sebelum batas waktu resmi, evaluasi progres triwulanan, dan penegasan target penyelesaian rekonsiliasi sebelum akhir tahun anggaran. Robbins dan Judge (2018) menjelaskan bahwa beban kerja tinggi dapat menurunkan ketelitian individu karena perhatian terfokus pada penyelesaian pekerjaan dalam waktu terbatas.

## SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan LKPD di BPKAD Kabupaten Gianyar telah dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan terintegrasi dalam keseluruhan siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan oleh OPD, rekonsiliasi dan konsolidasi oleh BPKAD, review oleh Inspektorat, hingga pemeriksaan oleh BPK. Proses ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana dianutkan dalam teori akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2009) dan prinsip *good governance* (Sedarmayanti, 2020). Capaian opini WTP secara konsisten menunjukkan penyajian laporan yang wajar sesuai SAP. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala substantif, yakni: gangguan sistem informasi pada periode puncak pelaporan, keterbatasan kompetensi dan kuantitas SDM, dominannya pengendalian korektif (*ex-post*), keterlambatan penyampaian data dari OPD, serta manajemen waktu yang belum optimal. Kendala-kendala ini bersifat saling berkaitan dan mencerminkan ketidakseimbangan antara kompleksitas sistem pengelolaan keuangan daerah dengan kapasitas pendukungnya. Saran tindak yang dirumuskan mencakup penguatan sistem

informasi, peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan, penguatan *knowledge management*, penataan distribusi SDM, penguatan pengendalian preventif melalui rekonsiliasi berkala, dan perbaikan manajemen waktu. Perbaikan-perbaikan ini harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, tidak bersifat parsial, agar mampu meningkatkan kualitas substantif pelaporan keuangan daerah secara berkelanjutan.

Bagi BPKAD Kabupaten Gianyar, disarankan untuk memperkuat mekanisme rekonsiliasi periodik, meningkatkan pemanfaatan dan stabilitas sistem informasi keuangan, menyelenggarakan bimbingan teknis berkelanjutan, dan mengembangkan budaya pengendalian preventif. Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan kebijakan penguatan kapasitas SDM dan mendorong koordinasi lintas OPD. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar memperluas cakupan objek ke beberapa pemerintah daerah atau menggunakan pendekatan *mixed methods* untuk mengukur pengaruh faktor kompetensi SDM dan pengendalian internal terhadap kualitas LKPD secara kuantitatif.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adiputra, I. M. P., Astawa, I. G. P. B., Sinarwati, N. K., & others. (2021). *Management accounting innovations and financial performance: The role of economic crisis perceptions and business strategy*. Bank Indonesia.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). *Auditing and assurance services: An integrated approach* (16th ed.). Pearson Education.
- Atmadja, A. T., Saputra, K. A. K., Manurung, D. T. H., & Wulandari, R. (2021). Factors that influence financial management: A case study in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(6), 1203–1211.
- Ayu, G., Rencana, K., Firdaus, & Dewi, S. (2024). Pengaruh kompetensi SDM, penerapan sistem informasi akuntansi, dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes di Kecamatan Dawan. *Jurnal*, 13(3), 93–102.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2012). *Internal control – Integrated framework*. <https://www.ic.coso.org>
- Dewi, N. A. W. T., Silviani, N. L. P. D., & Anggraeni, N. K. M. (2022). The effect of local revenue, fiscal decentralization, and fiscal stress on government financial performance. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 1(9), 1887–1902.
- Diatmika, I. P. G., & Rahayu, S. (2020). Kompetensi perangkat desa terhadap sistem pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng. *Jurnal*, 2(4), 1–9.
- Flint, D. (1988). *Philosophy and principles of auditing: An introduction*. Macmillan Education.
- Halim. (2014). The effect of human resources planning and training and development on organizational performance in the government sector in

- Jordan. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 4(4), 79–85.
- Irwansyah, M. R., Agus, I. G., & Yudiantara, P. (2022). Why is it important to have good corporate governance in the management of foundation? *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 5(3), 643–647.
- Julianto, I. P., Sujana, E., & Dharmawan, N. A. S. (2023). Sosialisasi dan pendampingan penatausahaan laporan keuangan bagi bendahara desa di Kabupaten Buleleng. *Jurnal*, 8, 764–772.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi sektor publik* (Edisi revisi). UII Press.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation*. Oxford University Press.
- Pratama, E. A., Sinadela, S., & Gushendarto, G. (2024). Pengaruh penerapan SAP berbasis akrual, kompetensi SDM, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan OPD Provinsi Jambi. *ECOMA*, 2(1), 45–57.
- Prayogo, Y., Fikri, A. S., & Nandini, K. P. (2023). Analisis implementasi PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal*, 3(2), 44–58.
- Prayudi, M. A. (2024). The impact of good corporate governance implementation. *Jurnal TEAMS*, 10, 769–781.
- Rahmayani, M. W. (2023). Kualitas SDM dan pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(2), 293–300.
- Reason, J. (1993). Review of human error. *Ergonomics*, 39, 1056–1057.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2018). *Perilaku organisasi* (16th ed.). Salemba Empat.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting information systems* (14th ed.). Pearson Education.
- Safrizal, N. A. W. (2023). Bimbingan teknis peningkatan pemahaman penyusunan laporan keuangan terhadap penerapan SAP pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal*, 4(3), 2275–2280.
- Sedarmayanti. (2020). The effect of good governance, leadership, and organizational culture on public performance accountability. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(1), 70–81.
- Sinarwati, N. K., & Bhisma Putra, K. (2025). Analisis kualitas laporan keuangan BUMDes. *JIAH*, 15(1), 47–57.
- Sujana, E., & Dharmawan, N. A. S. (2023). Audit quality improvement and the role of risk: Audit as a moderator. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 17(4), 213–228.